Selasa, 25/05/2010

Dinas Koperasi Depok lakukan pendataan

Oleh: Wawan Fury

DEPOK (Bisnis.com): Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar (DKUP) Kota Depok melakukan pendataan koperasi dengan melibatkan kalangan akademisi. Tujuannya, untuk mengetahui koperasi yang aktif, tidak aktif, dan mati suri.

Pendataan yang valid dan andal ini melibatkan pihak perguruan tinggi seperti Universitas Gunadarma untuk mendata koperasi dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran untuk mendata Usaha Kecil Menengah (UKM). Hasil pendataan ini akan dilaporkan kepada Komisi B DPRD Kota Depok yang menangani bidang ekonomi, termasuk koperasi, UKM, dan Pasar. Data ini akan dijadikan bahan road map koperasi dan usaha kecil Depok yang memiliki payung hukum.

"Dengan data itu masalah yang ada menjadi jelas dan terpetakan dengan baik, sehingga penanganan atau terapinya dapat lebih maksimal. Misalnya, ada yang butuh manajerial, ada yang butuh pelatihan atau butuh permodalan," papar Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar (DKUP) Herman Hidayat, di ruang kerjanya hari ini.

Lebih jauh dia mengatakan guna menggerakkan atau menghidupkan kembali koperasi yang telah mati suri dibutuhkan semangat dan niat dari anggota koperasi tersebut. Hal ini yang harus ditumbuhkan dalam diri para anggota agar koperasi tersebut dalam hidup kembali.

Dia mengungkapkan dinas yang kini dipimpinnya terbuka bagi warga yang ingin berkonsultasi tentang koperasi yang tengah mati suri. Sebagai permulaan, warga dapat mengirimkan surat lebih dahulu ke Kantor Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar. Surat tersebut berisikan persoalan yang dihadapi oleh warga atas koperasi yang mereka miliki.

"Kirimkan surat yang disertakan dengan keterangan badan hukum, berapa banyak anggota, alamat, dan segala bentuk kejelasan atas keberadaan koperasi tersebut," kata Herman.

Selain itu, Herman juga menjelaskan, pada 2010 ada 13 UKM dan empat koperasi yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk hibah.

Menurutnya, bantuan tersebut saat ini sekarang tengah memasuki tahap verifikasi oleh Pemprov Jabar. “Kami mengajukan 13 UKM dan empat koperasi ini untuk memperoleh bantuan dari Pemprov Jabar. Jadi, posisi kami hanya memfasilitasi saja. Program tersebut mutlak milik Pemprov Jabar,” ujar Herman.

Lebih lanjut dia menjelaskan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan ini, ada tahap verifikasi dengan cara mendatangi koperasi dan UKM tersebut bersama dengan staf di dinas. Tinjauan langsung ke lapangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi dan UKM tersebut ada dan bukan fiktif.

Hasil dari verifikasi ini belum dapat diumumkan, tetapi dalam waktu dekat Pemprov Jabar akan mengeluarkan hasil verifikasi tersebut. Verifikasi yang dilakukan Pemprov secara langsung ini juga melibatkan perguruan tinggi di Bandung, seperti Universitas Padjajaran dan beberapa universitas lainnya di Jawa Barat. (msb)